



MK+



TETAP HADIR MELINDUNGI

Pemerintah tanggap untuk tetap memprioritaskan kelompok rentan sebagai bagian masyarakat yang terdampak paling keras. Sejumlah program perlindungan sosial tetap dilanjutkan di tahun ini. Penyaluran belanja pemerintah melalui program perlindungan sosial masih menjadi penopang agar ekonomi tetap terjaga.

Daftar Isi

APBNKITA

04 Realisasi APBN 2020

DARI LAPANGAN BANTENG

05 Bekerja Maksimal Demi Bantuan Sosial

PHOTO STORY

06 Kelola Ban Bekas Agar Naik Kelas

LAPORAN UTAMA

08 Perlinsos: Sekoci yang Menjaga Daya Beli

10 Perlindungan Sosial, Paling Krusial

12 Infografik

GENERASI EMAS

14 Bukti Karya

Bantu Budi Daya

POTRET KANTOR

16 Panjang Umur

Pengabdian

TEKA-TEKI

18 Teka Teki Februari Edisi Minggu Pertama

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Pelindung: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.
Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Budi Prayitno, Budi Sulistyio. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budiando Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

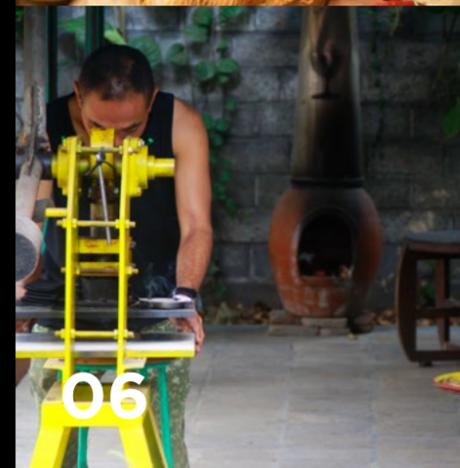


Foto Cover Resha Aditya

COVER STORY:

Program perlindungan sosial (Perlinsos) masih menjadi salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021. Pada cover majalah edisi ini, kami mengibaratkan program perlindungan tersebut dengan sebuah payung. Orang memegang payung untuk melindungi dari cuaca yang panas dan juga hujan. Begitu juga dengan Perlinsos yang melindungi masyarakat dari efek ekonomi dari pandemi Covid-19.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.



Realisasi APBN 2020

(APBNKITA Januari 2021)

Pendapatan Negara

Rp1.633,59 (96,10%)

Belanja Negara

Rp2.589,89 (94,55%)

(Rp642,21) 91,69%

Keseimbangan Primer

(Rp956,30) 92,2%

Surplus/ (Defisit) Anggaran

Rp1.190,95 (114,60%)

Pembiayaan Anggaran

* Angka bersifat sementara, realisasi final akan disajikan dalam LKPP tahun 2020

Bekerja Maksimal Demi Bantalan Sosial

Sudah genap satu tahun COVID-19 melanda

Indonesia. Pengalaman *extraordinary* ini mengasah kepekaan dan kesigapan kita untuk memutuskan kebijakan yang tepat dalam waktu sesegera mungkin agar kondisi kita tidak semakin terpuruk. Pun di tengah krisis pandemi ini pemerintah tanggap untuk tetap memprioritaskan kelompok rentan sebagai bagian masyarakat yang terdampak paling keras. Sejumlah program perlindungan sosial tetap dilanjutkan pada tahun 2021 ini mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, hingga BLT Dana Desa.

Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kerja keras APBN 2020 sebagai penggerak

utama perekonomian, khususnya melalui belanja pemerintah. Pada tahun 2021 ini, APBN masih menjadi instrumen *countercyclical*. Penyaluran belanja pemerintah melalui program perlindungan sosial masih menjadi penopang agar ekonomi kita tetap terjaga.

Program perlindungan sosial baik yang reguler maupun non-reguler dapat dimanfaatkan sebagai “bantalan” agar angka kemiskinan tidak jauh bertambah sekaligus memperkuat daya tahan kelompok rentan. Upaya pemerintah ini tentu saja

membutuhkan dukungan dan masukan dari segenap komponen masyarakat agar program perlindungan sosial mencapai tujuan utamanya yaitu tepat guna, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Pembaca dapat menilik lebih lanjut ikhtiar-ikhtiar baik dari pemerintah bagi masyarakat kelompok rentan melalui edisi ini. Salam sehat!

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Bagi sebagian orang, ban bekas mungkin tidak memiliki nilai tambah. Namun, bagi sekelompok seniman dan relawan Komunitas Tanam Untuk Tumbuh, limbah ini bisa naik kelas. Melalui proses kreatif di sebuah *workshop* sederhana di Salatiga, Jawa Tengah, terciptalah berbagai produk menawan seperti tas, dompet, gelang, hingga anting-anting dari barang-barang bekas macam ban mobil, terpal tenda, hingga serat *webbing*. Mengusung merk Sapu Upcycle, produk-produk ini berhasil menembus pasar Eropa. Semangat komunitas ini adalah melestarikan lingkungan sekaligus menciptakan karya bernilai ekonomis. Sebagian dari penghasilan yang didapatkan dari penjualan produk-produk Sapu Upcycle ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan.

Kelola Ban Bekas Agar Naik Kelas

Teks Resha Aditya Foto Adhi Kurniawan



Perlinsos: Sekoci yang Menjaga Daya Beli

Teks Dara Haspramudilla Foto iStock

Perlinsos efektif mempertahankan daya beli rumah tangga masyarakat rentan dan miskin.

Pandemi masih belum berakhir, begitu pula upaya pemerintah dalam menanganinya. Di tahun 2020, program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu sekoci dalam penyelamatan perekonomian Indonesia. Untuk itulah, tahun ini pemerintah kembali mengalokasikan anggaran perlinsos dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp110,2 T yang terbagi ke dalam lima program utama yakni Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Kartu Prakerja.

Menurut Abra Talattov, ekonom INDEF, program perlinsos membuat ekonomi Indonesia di tahun 2020 tidak jatuh terlalu dalam. Perlinsos menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebab hampir 60 persen pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh belanja masyarakat.

“Perlinsos membantu pertumbuhan PDB dari konsumsi rumah tangga sedikit membaik. Selain itu, juga efektif mempertahankan daya beli rumah tangga masyarakat rentan dan miskin. Untuk itu, perlinsos masih perlu dilanjutkan di tahun 2021, terutama alokasi di 2020 yang belum terserap, apalagi melihat kondisi ekonomi kuartal I/2021 masih cukup berat,” terang Abra.

Ia juga menambahkan, keputusan pemerintah mengkonversi bansos sembako menjadi bansos tunai sangat tepat.

“Ketika masyarakat mendapat *fresh money*, harapannya uang

itu bisa berputar, dibelanjakan di warung, kelontong atau UMKM. Itu nantinya bisa memutar roda ekonomi di masing-masing wilayah dibanding sebelumnya ketika bansos sembako pengadaannya ke perusahaan,” tambahnya.

Bantuan Sosial Produktif

Di tahun 2021 ini, Pemprov Jawa Barat (Jabar) tidak lagi memprioritaskan bantuan sosial. Hal ini melihat pertumbuhan ekonomi Jabar sudah membaik dan di tahun 2021 angkanya sudah di atas 0 menuju positif.

“Ada indikasi pergerakan jual-beli dan daya beli meningkat. Fokus kami di 2021 adalah bantuan untuk UMKM dari sisi modal. Tujuannya untuk meningkatkan pergerakan ekonomi menengah bawah. Sejalan dengan itu, kami juga akan membuat kampanye ‘Belanja adalah Bela Negara’ untuk seluruh PNS Jabar. Mereka akan diwajibkan belanja di UMKM, pedagang kecil agar ekonomi bergerak,” tutur Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menanggapi hal ini, Abra menilai bahwa ada dua pertimbangan yang menjadi alasan di balik kebijakan ini. Pertama, peningkatan daya beli masyarakat yang terlihat dari indikator inflasi yang membaik. Kedua, indikator PMI manufaktur yang juga menandakan permintaan masyarakat terhadap produk-produk industri mulai menggeliat.

“Transisi bansos konsumtif ke bansos produktif seperti bantuan UMKM dapat dipertimbangkan dalam membantu pemulihan perekonomian. Dari sisi konsumsi, para pekerja terutama pekerja informal dapat

meningkatkan kinerja bisnisnya. Ketika pendapatan naik otomatis belanja juga akan naik. Dari sisi investasi juga memiliki *multiplier effect*. Ketika UMKM mulai bergeliat akan menciptakan rantai pasok yang panjang juga antar-UMKM,” tanggapnya.

Masalah klasik yang terus mengusik

Di balik manfaatnya yang besar untuk masyarakat, terkait data penerima bantuan masih menjadi kendala di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Ridwan Kamil.

“Pemprov Jabar harus membersihkan data awal yang diterima sampai 23 kali filter untuk melihat apakah calon penerima masih hidup, apakah masih memenuhi syarat dan seterusnya. Problematika data ini muncul akibat kementerian dan lembaga membuat survei masing-masing dan tidak terintegrasi. Dampaknya bagi Pemprov Jabar sendiri masalah data ini menjadi penyebab timbulnya kecemburuan sosial saat penyaluran di lapangan. Sehingga *next time* rekomendasi saya pascacovid, perbaikan data itu harus jadi *urgency*,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Hal senada juga diungkap Abra. Menurutnya, percepatan penyelesaian pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus segera dilakukan.

“Tahun 2021 harus jadi tahun penting pemerintah bisa mengharmonisasi data penerima bansos. Apalagi pasti DTKS ini mengalami perubahan sebab adanya pandemi ini pasti ada sebagian kelompok rumah tangga yang masuk karena pendapatan menurun atau mendapat pemutusan hubungan kerja,” tambahnya.

Perlindungan Sosial, Paling Krusial

Teks Reni Saptati D.I Foto Istock

Cita-cita bangsa Indonesia terukir jelas sejak awal berdirinya negara ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan terwujudnya perlindungan sosial (perlinsos) yang adil dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dari waktu ke waktu, program perlinsos terus disempurnakan. Dari tahun ke tahun, alokasi anggaran dan cakupannya makin meluas. Kini, pada masa pandemi COVID-19, anggaran perlinsos menjadi salah satu upaya paling krusial untuk menanggulangi dampak pandemi. Pada tahun 2020, perlinsos dianggarkan sebesar Rp495 triliun, tumbuh 31 persen dibandingkan 2019.

APBN bekerja maksimal

Dalam wawancara dengan Media Keuangan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerangkan bahwa sebelum COVID-19 menghampiri Indonesia, pemerintah telah

mengestimasi apa yang akan terjadi dengan perekonomian jika pandemi kemudian benar-benar datang. Pemerintah telah menyadari sedari awal bahwa akan ada kelompok masyarakat yang terdampak luar biasa.

“Kelompok pekerja mungkin akan mengalami pengurangan jam kerja, akan dirumahkan, sehingga mengurangi *income* mereka. Kelompok miskin pasti akan kesulitan mencari kerja, kelompok menengah akan mengalami pengurangan *income* atau bahkan juga kehilangan pekerjaan. Nah, dengan demikian maka dari awal kita menyadari bahwa perlindungan sosial itu adalah salah satu hal yang harus kita rancang untuk menangani dampak COVID-19 di 2020,” tutur pria yang mendapat gelar Guru Besar di Bidang Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 2009 tersebut.

Program perlinsos dalam APBN 2020 kemudian diramu agar mampu memberi perlindungan maksimal di tengah situasi yang tak pasti. Program

yang sudah berjalan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sementara itu, sejumlah program baru yang belum pernah dilakukan kemudian diusulkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kartu Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, subsidi upah adalah sebagian bentuk bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat yang terangkum dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Suahasil mengungkapkan, program perlinsos tersebut membuat APBN mampu bekerja maksimal dalam menangani COVID-19. “Artinya, kita betul-betul melihat seluruh kelompok yang memerlukan perlindungan sosial dan kemudian kita *cover*,” tegasnya. Hasilnya, penyaluran program perlinsos pada tahun 2020 membuahkan kinerja yang cukup baik untuk menekan laju kemiskinan. Program ini mampu menekan tingkat kemiskinan pada

tahun 2020 sebesar 9,69 persen. Dari simulasi yang dilaksanakan, jika program perlinsos tidak disalurkan selama pandemi, angka kemiskinan bisa mencapai 10,96 persen.

Penyempurnaan terus dilakukan agar program perlinsos bisa makin tepat sasaran. Perbaikan data menjadi isu yang sangat fundamental demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. “Apa yang kita lakukan untuk bisa memperbaiki data itu? Ya di-*update*, harus di-*update* datanya secara reguler dengan cara yang benar,”

kata Suahasil.

Selain perbaikan data, Suahasil juga menyoroti beberapa hal lain yang perlu disempurnakan. “Kita akan terus sempurnakan data, sempurnakan tata kelola, sempurnakan prosedur untuk implementasinya, juga sempurnakan nilai manfaatnya. Kita perhatikan siapa lagi yang seharusnya mendapatkan, lalu akan kita cocokkan lagi nanti dengan kondisi keuangan negara.”

Bantuan sosial berlanjut

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sudah dimulai sejak awal tahun ini dinilai bisa menjadi *game changer* pemulihan ekonomi. Namun demikian, Suahasil menerangkan berbagai proyeksi lembaga dunia dan peneliti menyatakan ketidakpastian pada tahun 2021 masih tetap tinggi. Oleh sebab itu, pada tahun ini pemerintah masih akan berfokus pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, khususnya untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Pada APBN 2021, anggaran sebesar Rp110,2 triliun dialokasikan untuk bidang perlinsos, yaitu Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, pemberian bansos bagi 10 juta KPM, juga melanjutkan program Kartu Prakerja dan BLT Dana Desa. Namun, jika diperlukan, pemerintah dapat memperluas cakupan maupun menambah durasi perlinsos kepada masyarakat. “Kita akan terus melihat kondisi perekonomian dan melihat (cakupan dan durasi perlinsos) ini cukup atau tidak, ada atau tidak yang perlu dibantu lagi. Kita akan terus melihat data dan melakukan estimasi,” pungkasnya.

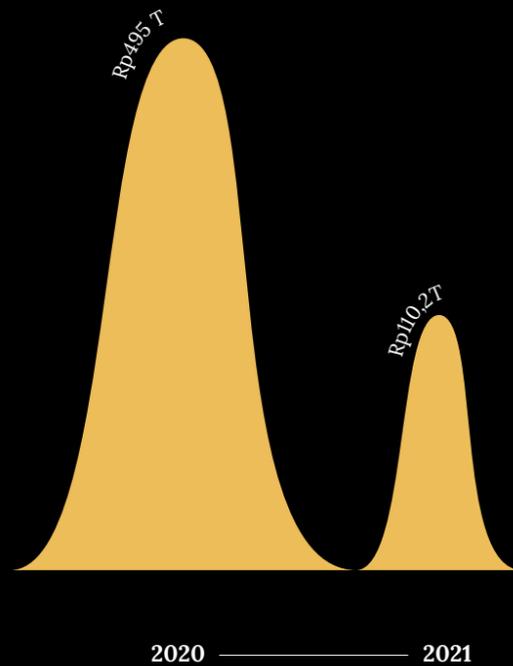


Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sudah dimulai sejak awal tahun ini dinilai bisa menjadi *game changer* pemulihan ekonomi.

Melindungi yang Rentan Melalui Perlinsos

Ketidakpastian yang masih membayangi situasi global dan tanah air akibat pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus senantiasa sigap dan peka menantisipasi kerentanan sosial sebagai dampak dari pandemi. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan untuk tetap melanjutkan program perlindungan sosial atau perlinsos di tahun 2021 ini. Apa saja yang sudah dan akan diberikan pemerintah melalui program perlinsos ini?

Anggaran Perlinsos



Capaian Perlinsos Tahun 2020

Menekan tingkat kemiskinan sebesar



Menekan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2020 dari minus 5,32% menjadi



Distribusi Perlinsos Tahun 2020



Program Keluarga Harapan (PKH):
10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)



Bantuan upah guru honorer:
2,6 juta guru



Program Kartu Sembako:
19,4 juta KPM



Iuran Jaminan Kesehatan Nasional:
96,7 juta peserta PBI



Bansos Sembako Jabodetabek:
2,2 juta KPM



Bantuan pendidikan:
16,2 juta siswa miskin



Bansos Tunai Non Jabodetabek:
9,2 juta KPM



KIP Kuliah:
845,4 ribu mahasiswa



Program Pra Kerja:
5,6 juta penerima



Bantuan Kuota Internet:
42,3 juta siswa



Bantuan upah:
12,4 juta karyawan

Rencana Program Perlinsos Tahun 2021



Program Keluarga Harapan (PKH)
bagi 10 juta KPM



Kartu Sembako:
18,8 juta KPM



Bansos Tunai:
10 juta KPM



Pra Kerja dan BLT Dana Desa

Sumber:

Direktorat Jenderal Anggaran



“Di tahun 2020 Belanja Bantuan Sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 80% (yoy), ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi.”

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan
9 Januari 2021

Bakti Karya Bantu Budi Daya

Teks Resha Aditya Foto Dokumentasi Pribadi



Fajar Sidik Abdullah Kelana
 Pendiri Banoo

Berawal dari proyek kecil-kecilan saat kuliah SI Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada (UGM), kini Banoo telah meraih berbagai *award* di bidang inovasi dan teknologi. Fajar Sidik Abdullah Kelana merupakan sosok dibalik berdirinya Banoo, sebuah *start-up* teknologi perikanan. Saat ini, Fajar sedang menempuh Pendidikan S2 di KTH Royal Institute of Technology Swedia. Seperti apakah kisahnya? Simak perbincangan Media Keuangan berikut ini.

Bisa Anda ceritakan latar belakang berdirinya Banoo?

Saat kuliah di UGM, saya cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus, seperti tergabung dalam tim pengembangan mobil listrik Arjuna dan melakukan berbagai riset,

terutama riset yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat. Tahun 2016, kebetulan ada riset yang dilakukan bersama dengan pusat studi energi untuk mengembangkan teknologi yang dinamakan *microbubble generator*. Teknologi ini awalnya dipergunakan untuk pengolahan limbah. Saat itu, kami melakukan eksperimen di Pengolahan Limbah Lindi di TPST Piyungan Yogyakarta. Setelahnya, saya merasa seharusnya teknologi ini bisa diaplikasikan ke bidang lain. Karena saya anak dari petani miskin, akhirnya saya terpikir untuk mengaplikasikan *microbubble generator* ini ke sektor budi daya perikanan.

Para petani budi daya ikan rata-rata hidup secara pas-pasan dan belum terbantu teknologi. Padahal, dengan penerapan teknologi, petani bisa menaikkan taraf hidup mereka dengan lebih baik lagi. Akhirnya, kami mencoba mengaplikasikan teknologi *microbubble generator* untuk budi daya ikan yang berkembang sampai sekarang dengan nama Banoo.

Bagaimana Banoo bisa meningkatkan produktivitas para petani budi daya ikan?

Jadi di Banoo ini, kami menggunakan konsep *microbubble*. *Microbubble* merupakan teknologi penghasil gelembung dengan ukuran mikro yang *rising velocity* atau kecepatan gelembung naik ke permukaan air menjadi semakin lambat sehingga gelembung tersebut semakin lama berada di dalam air. Bila dibandingkan ukuran gelembung yang diproduksi dari mesin aerator biasa, *microbubble generator* mampu menghasilkan kadar oksigen di dalam air yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian, kualitas air menjadi lebih baik, ikan menjadi lebih sehat dan nafsu makannya meningkat sehingga produksi ikan bisa meningkat sampai 40 persen dan masa panen menjadi lebih pendek.

Kelebihan *microbubble generator* Banoo adalah menggunakan teknologi otomatisasi sehingga alat ini tidak perlu dinyalakan selama 24 jam. Jadi, mesin hanya akan menyala kalau kadar oksigennya rendah atau kualitas air kolam buruk sehingga lebih hemat listrik. Kami membuat sensor untuk mengukur kualitas air yang di tempel di alat *microbubble* tersebut. Selain itu, kami juga mengembangkan fitur agar bisa dipantau melalui aplikasi. Kalau ada masalah dengan air kolam, aplikasi tersebut bisa memberikan info atau notifikasi ke pembudidayanya melalui *smartphone*.

Apa yang membuat Anda tertarik untuk mendaftar beasiswa LPDP?

LPDP merupakan pilihan terbaik bagi anak muda Indonesia jika ingin sekolah di luar negeri melalui jalur beasiswa. Dengan segala dukungan yang ada, mulai dari *living allowance*, *settlement allowance*, LPDP sangat membantu dan membuat kita merasa nyaman dan aman saat mengambil studi di luar negeri. Selain itu, ada forum Mata Garuda yaitu komunitas dari para alumni LPDP yang memiliki ikatan yang sangat kuat. Saat saya membutuhkan



Tim Banoo memasang alat microbubble generator dan aplikasi banoo

info, riset, atau referensi jurnal, saya tinggal kontak Mata Garuda maka info yang saya butuhkan dapat segera didapat.

Menjadi peserta beasiswa dari LPDP bagi saya juga merupakan salah satu bentuk cinta tanah air kita karena para alumni LPDP diwajibkan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari *study* di Indonesia. Jadi ada ikatan. Beberapa *awardee* pasti ada godaan untuk tetap *stay* di negara lain setelah lulus. Akan tetapi, dengan ikatan di LPDP, ketika lulus nanti saya harus pulang ke Indonesia dan bagi saya ini justru menjadi cara untuk menjaga kecintaan kita terhadap tanah air agar tidak luntur.

Mengapa Anda memilih KHT Royal Institute of Technology Swedia?

Swedia merupakan negara nomor dua paling inovatif di dunia berdasarkan *Global Innovation Index*. Di sini, kami lebih sering membicarakan tentang inovasi. Bukan hanya tentang pengembangan teknologi *hardware* saja,

tetapi juga cara bagaimana membuat ekosistem inovasi yang baik. Dari sini, saya bisa belajar mengapa di Indonesia inovasinya masih kurang, mengapa Swedia bagus. Itu kami pelajari juga di sini. Mimpi besar saya adalah ingin membuat sistem dan ekosistem inovasi yang baik di Indonesia.

Apa pesan Anda bagi anak-anak muda Indonesia yang lain yang sedang meraih cita-cita?

Anak muda sekarang sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Setiap orang memiliki *value*. Anak-anak muda sekarang pasti memiliki keunggulan masing-masing dan kita harus terus mengenali diri sendiri. Kita unggul di mana dan kita bisa apa. Saat kita tahu kita unggulnya di mana, kita kembangkan itu. Dalam proses mengembangkannya juga jangan semata-mata hanya untuk diri sendiri, tetapi lakukanlah agar potensi Anda juga dapat bermanfaat untuk orang lain.

Panjang Umur Pengabdian

Teks Aditya Wirananda Foto Dok. KPPN Serui

Saat bicara soal sisi timur wilayah republik ini, sebagian dari kita tak jarang hanya mengenal pulau-pulau besarnya saja. Papua, Sulawesi, sesekali Maluku, dan mungkin Halmahera.

Aksesibilitas terbatas

Jika kita berasumsi bentuk Papua serupa kepala burung, di bagian tenguknya terdapat pulau-pulau kecil. Kepulauan itu terbagi dua. Sebagian di sisi utara, masuk wilayah Kabupaten Biak Numfor, dengan pusat pemerintahan di Biak. Sedangkan sebagian lagi di sisi selatan masuk Kepulauan Yapen, dengan pusat pemerintahan di Serui. Kali ini, mari berkenalan dengan Serui.

Kita mungkin tak pernah terpikir tentang apa saja yang ada di sana, bagaimana perekonomian di sana, atau bahkan bagaimana menuju ke sana. "Waktu dapat SK (Surat Keputusan), bingung saya. Ini gimana caranya ke Serui," kata Noegroho, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serui sambil berkelakar.

Penerbangan menuju Serui, menurut kisah Noegroho, selain tak bisa langsung dari Jakarta, tak bisa juga

dipesan melalui agen tiket daring. Ia harus menuju Biak lebih dulu. Pun, penerbangan dari Biak menuju Serui, tak setiap hari ada. Dalam seminggu, terdapat tiga kali penerbangan. "Jadi kalau kita mau keluar masuk Serui itu jadi rumit," ujarnya. Penerbangan dari Biak ke Serui ditempuh selama sekitar 20 menit. "Kalau pakai kapal cepat sekitar enam jam," kata lelaki asal Pati ini.

Isu aksesibilitas ini menjadi tantangan juga bagi KPPN Serui dalam memberikan pelayanan. Saat ini, KPPN Serui melayani 33 satuan kerja. Sebelum dibentuknya KPPN Serui, mereka dilayani oleh KPPN Biak. Untuk menuju Biak, satuan kerja ini memerlukan perjuangan yang lebih panjang lagi. Saat ini, kendati tantangan geografis masih tetap ada, kehadiran KPPN Serui telah membantu memangkas jarak itu.

Mental personel

Untuk melayani satuan kerja di wilayah Kepulauan Yapen, KPPN Serui ditenagai 15 personel termasuk Kepala Kantor. Dari jumlah itu, sebagian besar adalah pendatang. Noegroho juga menambahkan, hampir seluruh pegawai di KPPN Serui adalah orang-orang



Kegiatan di KPPN Serui



baru. "(Pegawainya) Benar-benar baru ya. Artinya baru ditempatkan. Kalau pejabatnya, baru promosi," ujarnya.

Lokasi yang secara geografis tidak menguntungkan ini, menurut Noegroho juga berdampak pada kondisi psikologis personilnya. Ia mengatakan, "Secara manusiawi, *down* itu pasti." Kehilangan atas sejumlah privilese memang sewajarnya mempengaruhi mental seseorang. "Proses untuk bertahan di 'Kawah Candradimuka' itu bukan proses yang mudah ya," ia melanjutkan, "bisa dibayangkan lah gimana rumitnya kalau kita ada di suatu daerah yang aksesnya itu terbatas."

Sedangkan, pekerjaan juga terus menuntut dituntaskan. Kendati satuan kerja yang dilayani tidak begitu banyak, bukan berarti hal itu membuat pekerjaan jadi lebih mudah. "Kami juga harus memastikan satker itu *on track* dan sesuai dengan target waktunya. Karena kalau ada satu saja yang tidak berhasil, itu IKU kami tidak tercapai," ia melanjutkan, "ketika jumlah satkernya kecil, maka bobotnya (dalam penilaian kinerja) per satker itu jadi besar." Namun, tantangan dapat dituntaskan oleh KPPN Serui. Alih-alih menurun, nilai organisasi KPPN Serui pada 2020 justru meningkat dari periode sebelumnya, dari semula 105,44 menjadi 108,11.

Pemerataan konektivitas

Sejak pandemi global COVID-19 melanda, aktivitas manusia beralih

dalam tempo yang singkat. Hal-hal terkait pelayanan yang semula mengandalkan tatap muka, diramu sedemikian rupa agar bisa dijalankan secara daring. Ketergantungan pada mobilitas beralih menjadi ketergantungan pada konektivitas.

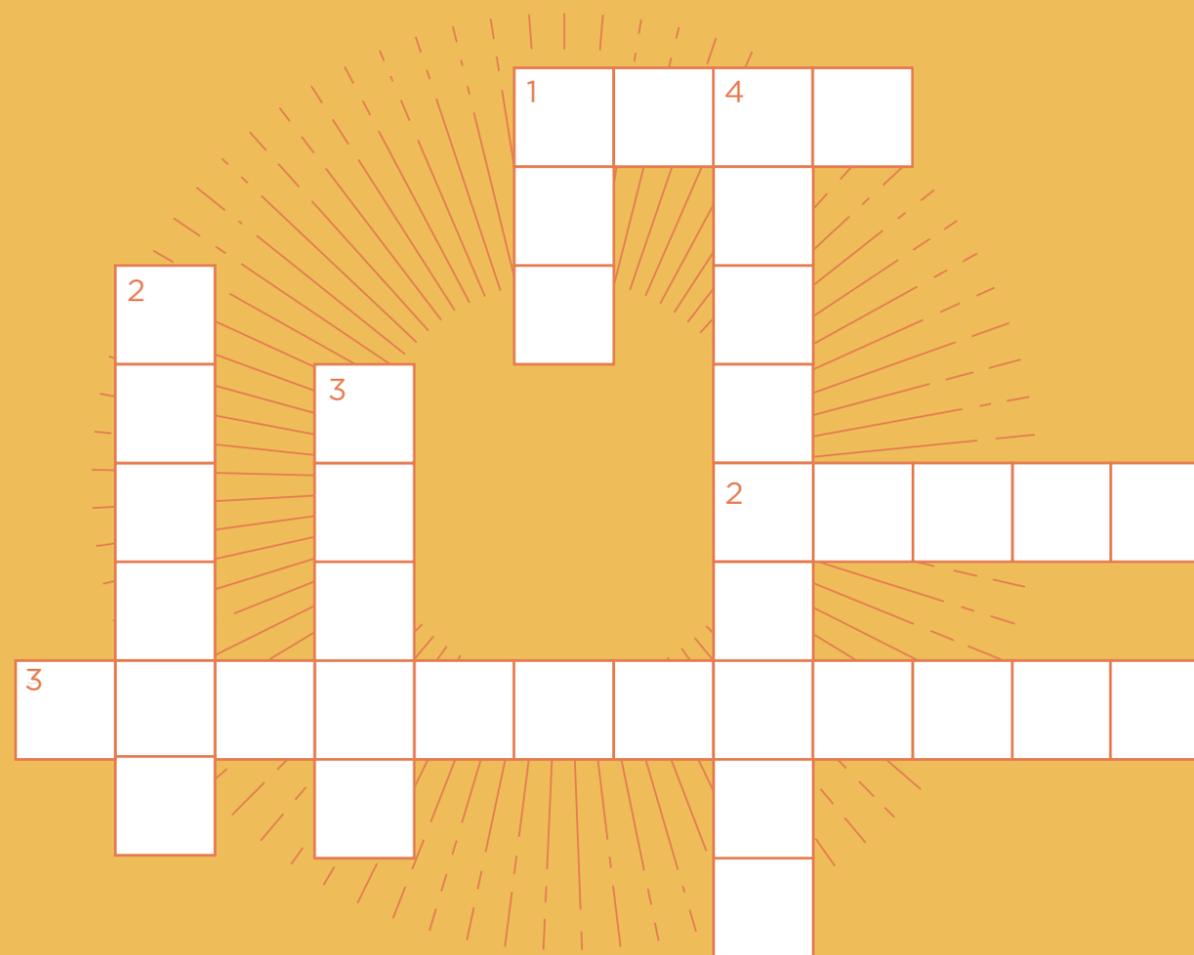
Bagi Noegroho dan timnya di KPPN Serui, permasalahan konektivitas sama rumitnya dengan mobilitas. "Jaringan internet itu tidak menentu. Kadang bagus, kadang tidak," ujarnya. Faktor cuaca, menurutnya, sejauh ini juga mempengaruhi kestabilan internet di wilayah itu. Situasi ini tak hanya dihadapi oleh KPPN Serui, melainkan satuan kerja lain di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. "Untuk mengakses jaringan internet itu, kadang harus mencari suatu tempat," lanjutnya, "yang tempatnya itu tinggi, yang sinyalnya kuat. Waktunya dini hari, saat orang belum banyak menggunakan internet." Bahkan kendala jaringan ini terjadi pula saat wawancara dilakukan.

Noegroho berharap, kendala terkait teknologi informasi tak lagi terjadi di masa mendatang. Ia menginginkan tidak adanya kesenjangan teknologi informasi antarwilayah di Indonesia. Selain itu, ia berharap suatu saat keberadaan KPPN hanya perlu sampai di tingkat provinsi. Selebihnya, proses bisnis yang ada dapat didigitalisasi. Ia meyakini, hal itu tidak sulit untuk diwujudkan dengan adanya pemerataan jaringan internet di Indonesia.



Kami Berbenah Buatmu ...

tekateki.



Mendatar:

- 1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 2. Wilayah kepulauan di Papua. Beribukota di Serui.
- 3. Kabupaten terkaya di Indonesia. (BPS 2020)

Menurun:

- 1. Kemenkeu Learning Center
- 2. Permisi, maaf. (Sunda)
- 3. Obligasi berbasis syariah
- 4. Salah satu nilai Kementerian Keuangan.

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Hari Hijab Sedunia

1 Februari 2021



Foto: iStock